

JURNAL

LANGKAH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK

PIDANA PENIPUAN PERDAGANGAN ONLINE



Diajukan Oleh :

DANING WIKU ANJARWI

NPM : 100510322

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

LANGKAH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN PERDAGANGAN ONLINE



Diajukan Oleh :

DANING WIKU ANJARWI

NPM : 100510322

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 JANUARI 2015

CH. Medi Suharyono, SH.M.Hum

Tanda Tangan:.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

- I. Judul** : Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online.
- II. Nama** : Daning Wiku Anjarwi, CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The title of this thesis is "Step In Combating Crime Police Fraud Online Trading". With the formulation of the problem as follows: How the modus operandi of fraud cases through the online and whether there is trouble for the police in dealing with criminal fraud online . This research is a normative legal research studies that focus on the provisions of the applicable legislation. Source of data in this study consisted of secondary data and primary data.

Online fraud regulated in Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. The conclusion that the mode used online fraud perpetrators use the offer price is much cheaper than the market price which will make the victims are tempted by the low price. People are expected to be cautious in buying or selling through via online. The police need to be improved performance to cope with cases of fraud online trading either preventive, pre-emptive, and responsive.

Keywords: Police, Prevention, Fraud, Trading Online

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berkembang sangat pesat pada era sekarang ini. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan rasa ingin tahu yang sangat besar serta maraknya fasilitas yang ada membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet melalui handphone, ipad, tablet, dan lain sebagainya. Melalui internet transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien. Perdagangan atau transaksi melalui internet lebih di kenal dengan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-dagang (e-commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.¹

Kemajuan teknologi pada era sekarang ini selain memberi manfaat juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Timbulnya suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Kejahatan internet yang sering dilakukan adalah perdagangan *online* atau disebut *online shop* dengan cara menjual barang dagangan melalui media internet. Perdagangan *online* atau *online shop* bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, Sehingga membuat orang tertarik akan bisnis perdagangan *online* atau *online shop* yang sekarang lebih diminati. Namun dengan adanya hal ini banyak pedagang *online* yang berlaku tidak jujur, banyak

¹ http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI_ILMU_KOMPUTER/WAHYUDIN/Integrasi_e-commerce.pdf pada hari selasa tanggal 2 september 2014

oknum-oknum yang mengaku pedagang *online* dengan menawarkan barang dagangannya dengan harga murah tetapi oknum tersebut adalah penipu. Hal ini dapat merugikan orang lain maka dari itu peran kepolisian sangat penting untuk mengantisipasi agar tidak timbul korban-korban penipuan yang lainnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan judul : “ **Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi kasus penipuan melalui perdagangan *online* ?
2. Apakah ada kesulitan bagi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan perdagangan *online*?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hokum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyesuaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai penunjang.

BAB II : LANGKAH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PERDAGANGAN ONLINE

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.²

2. Tugas dan wewenang kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakan hukum, dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Cyber Crime

1. Perkembangan Cyber Crime di Indonesia dan Kejahatannya

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara. Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> pada tanggal 21 september 2014, pukul 15:45

pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan infoemasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi.

2. Pengertian Cyber Crime

Cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Bebebara sarjana menggunakan istilah “computer misuse”, “*computer abuse*”, “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”. Namun, para sarjana pada waktu itu pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.³

3. Bentuk-bentuk Cyber Crime

a) Berdasarkan jenis aktifitas

- 1) *Unauthorized acces to computer system and service*
- 2) *Illegal contents*
- 3) *Data forgery*

³ Budi Suhariyanto, S.H., M.H. Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime), Jakarta PT. RajaGrafindo Persada 2013 hlm 9.

- 1) *Cyber espionage*
- 2) *Cyber sabotage and extortion*
- 3) *Offense against intellectual property*
- 4) *Infrengments of privacy*

b) Berdasarkan Motif Kegiatan

- 1) Cybercrime sebagai tindak murni kriminal

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal, kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas.

- 2) Cybercrime sebagai kejahatan “abu-abu”

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah “abu-abu”, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak criminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan.

c) Berdasarkan Sasaran Kejahatan

Berdasarkan sasaran kejahatan , cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti berikut :

- 1) *Cybercrime* yang menyerang individu (*Against Person*)
- 2) *Cybercrime* menyerang hak milik (*Againts Property*)
- 3) *Cybercrime* menyerang pemerintah (*Againts Government*)

4. Akibat Kejahatan Cyber Crime

Adapun akibat atau dampak kejahatan *cybercrime* terdapat keamanan negara yang dapat disorot dari beberapa aspek, antara lain:

1. Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia

2. Berpotensi menghancurkan Negara
3. Keresahan masyarakat pengguna jaringan komputer
4. Dampak cybercrime terhadap keamanan dan kelangsungan dalam negeri

5. Penanggulangan Kejahatan Cybercrime

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanganan cyber crime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi.

C. Penipuan Perdagangan Online

1. Pengertian Perdagangan Online

Menurut Didit Agus Irwantoko, belanja *online* (*online shop*) merupakan proses pembelian barang/jasa oleh konsumen ke penjual *realtime*, tanpa pelayan, dan melalui internet. Toko *virtual* ini mengubah paradigma proses membeli barang/jasa dibatasi oleh tembok, pengecer, atau mall. Maksudnya, tak perlu harus bertemu penjual/pembeli secara langsung, tak perlu menemukan wujud 'pasar' secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer, dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi

jual/beli secara cepat dan nyaman.⁴ Perdagangan *online* juga dikenal dan digambarkan sebagai perdagangan elektronik.

2. Jenis-jenis Perdagangan Online

Adapun jenis-jenis bisnis *online* sebagai berikut:

- a) Affiliate Marketing / Reseller
- b) PPC (Pay Per Click)
- c) PTR (Paid To Review)
- d) Membuat produk sendiri
- e) Sistem keanggotaan berbayar
- f) Toko Online / Online Store
- g) Forex Online Trading

3. Pengertian Penipuan Perdagangan Online

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Dari pengertian diatas penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.

4. Ciri-ciri Penipuan Perdagangan Online

- a) Website yang digunakan tampak kurang profesional

⁴ <http://febbysylvia.wordpress.com/2013/12/16/184/> pada hari Jumat tanggal 7 november 2014 pukul 10:06 WIB

- b) Penjualnya tidak mau melakukan Cash On Delivery (COD)
- c) Alamat tempat usaha mencurigakan
- d) Harga barang jauh dibawah harga pasar/ harga yang ditawarkan sangat murah
- e) Produknya tidak jelas
- f) Tidak ada foto pemiliknya
- g) Tidak ada nomor telepon lokal

5. Modus Operandi Pelaku Kejahatan Penipuan Perdagangan Online

- a) Pelaku berlaku sebagai penjual produk dengan memasarkan atau menawarkan produknya, seperti barang-barang elektronik pada *website* atau situs jual beli *online*.
- b) Pelaku berlaku sebagai pembeli, dengan membeli barang yang ditawarkan pada *situs online* dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan nomor *credit card* orang lain.
- c) Penipuan melalui internet ini ada juga yang dilakukan dengan cara mengiming-imingi korban dengan hadiah yang menggiurkan.
- d) Didalam suatu website diperkenalkan sebuah perusahaan yang telah mempunyai nama dan kegiatan bisnis yang dilakukan. Berbagai penjelasan yang masuk akal dan keuntungan besar yang dijanjikan bagi investor, membuat pembacanya tertarik dan menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut.

D. Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online

Langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah dan meindaklanjuti tindak kejahatan penipuan perdagangan *online* adalah dengan melakukan tindakan *pre-emptif*, *preventif* dan *respresif*.

1. Tindakan *Pre-emptif*

Tindakan *pre-emptif* adalah pelaksanaan kegiatan kepolisian dengan melakukan kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong kejahatan penipuan perdagangan *online* sedini mungkin.

2. Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* adalah pelaksanaan kegiatan kepolisian untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Tindakan *Respresif*

Tindakan *respresif* yang dilakukan polisi dalam menangani kasus penipuan perdagangan *online* berawal dari :

- a) Adanya laporan
- b) Mencatat saksi
- c) Penyelidikan
- d) Penyidikan
- e) Melakukan penangkapan pelaku kejahatan

E. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Penipuan Perdagangan *Online*

Dalam menanggulangi tindakan penipuan perdagangan *online* yang sering terjadi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kendala, yaitu sebagai berikut:

1. Sulitnya pencarian pelaku
2. Keterbatasan sarana dan prasarana
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Undang-Undang/peraturan yang mendasari tindak pidana yang ditangani

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai langkah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak penipuan perdagangan *online* dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi kasus penipuan melalui perdagangan *online* adalah dengan cara :
 - a) Pelaku berlaku sebagai penjual dengan menawarkan produknya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, yang nantinya akan membuat para korbanya tergiur akan harga murah tersebut.
 - b) Pelaku juga berakting sebagai pembeli, dengan cara berpura-pura membeli barang yang ditawarkan pada suatu situs online dan

pembayarannya dilakukan dengan menggunakan nomor credit card orang lain.

c) Pelaku juga mengiming-imingi korbannya dengan hadiah yang menggiurkan agar korbanya mentransferkan uangnya dalam jumlah besar ke rekening korban dengan menjanjikan korban akan mendapatkan imbalan.

d) Pelaku juga membuat suatu website yang memperkenalkan sebuah perusahaan yang mempunyai nama dan berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menjanjikan keuntungan besar yang membuat pembacanya tertarik dan ingin menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut.

2. Kesulitan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan perdagangan *online* adalah sulitnya melacak keberadaan pelaku dikarenakan dalam kasus penipuan perdagangan *online* bisa siapa saja dan dimana saja orang dapat melakukannya, keterbatasan sarana dan prasarana yaitu salah satunya adanya keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dimana hampir semua kasus kejahatan yang memiliki undang-undang khusus dilimpahkan pada bagian reskrimsus sehingga menyebabkan kurangnya tenaga penyidik dalam menangani kasus *cyber*, dan sulitnya polisi dalam menentukan undang-undang atau peraturan yang mendasari tindak pidana yang ditangani.

2. Saran

1. Pihak kepolisian perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan terhadap tindak penipuan perdagangan *online* baik secara *preventif*, *pre-emptif*, dan *respresif* yang didukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu *cyber* yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tegas menangani kasus *cybercrime* terutama dalam kasus penipuan perdagangan online yang marak terjadi.
2. Masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam jual beli melalui via internet atau online, dan jangan mudah tertipu dengan barang murah yang harganya jauh dari pasaran. Banyak pedagang *online* yang menawarkan berbagai barang elektronik dengan harga yang sangat murah, maka dari itu diharapkan masyarakat tidak mudah tergiur dengan hal tersebut karena sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk mengungkap adanya kasus penipuan perdagangan *online*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Budi Suhariyanto,S.H.,M.H. 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Skripsi :

Dondy Dahoklory, Upaya yang dilakukan oleh Polisi dalam menangani praktek penipuan melalui media komunikasi dalam bentuk sms, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Website :

[http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI_ILMU_KOMPUTER/WAHYUDI N/Integrasi_e-commerce.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI_ILMU_KOMPUTER/WAHYUDI_N/Integrasi_e-commerce.pdf) pada hari selasa tanggal 2 september 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> pada tanggal 21 september 2014, pukul 15:45

<http://febbysylvia.wordpress.com/2013/12/16/184/> pada hari Jumat tanggal 7 november 2014 pukul 10:06 WIB